

PELATIHAN PERENCANAAN KEUANGAN BAGI PETUGAS PARKIR KOTA MATARAM

Nina Karina Karim

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
ninakarim@unram.ac.id

Siti Atikah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
siti.atikah@unram.ac.id

Indria Puspitasari Lenap

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
indrialenap@unram.ac.id

Article History:

Received: 26 Agustus 2022

Revised: 25 Oktober 2022

Accepted: 28 Oktober 2022

DOI:

10.29303/abdimassangkabira.v3i1.287

Abstract: *Knowledge on how to plan domestic income will help parking attendants to manage their daily income which will enable them to provide their children's education as well as other family needs. This training is intended to provide tips and ideas on how parking attendants listed in Mataram Municipality Transportation Services can manage their income that have recently been affected by the implementation of e-parking system. Participants of this training activity were given tutorials and counseling individually instead of groups in a classroom setting. As many as twenty parking attendants operating in business areas around Mataram and Cakranegara area were tutored on how to adjust to the new income pattern and were provided with booklets on financial planning. Information was also collected by means of questionnaires to acquire deeper background on the parking attendants' opinion on the implementation of the e-parking system.*

Keywords: *financial planning, parking attendant, income*

Pendahuluan

Sejak tanggal 15 Oktober 2020, Dinas Perhubungan Kota Mataram mulai melakukan uji coba penerapan pembayaran parkir non-tunai yang

dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan retribusi parkir Kota Mataram. Sebagaimana yang diberitakan dalam Inside Lombok dan Antaranews, uji coba tersebut dilakukan di tiga titik parkir, yaitu area parkir kafe dan restoran yang berada di jalan Bung Karno. Menurut M. Saleh, kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, ketiga titik parkir tersebut dipilih karena berdasarkan kajian, tempat tersebut sering didatangi oleh konsumen milenial yang diasumsikan sebagian besar menggunakan gawai Android dan tidak asing dalam menggunakan moda pembayaran non-tunai seperti OVO, Gopay, Shopeepay dan Linkaja.

Sistem pembayaran retribusi parkir non-tunai ini memungkinkan biaya parkir dibayar melalui aplikasi QRIS (QR code Indonesia Standar) dari Bank Indonesia. QRIS ini terhubung dengan aplikasi pembayaran non-tunai seperti OVO, Gopay dan lain-lain. Setiap titik parkir akan diberikan QR code yang akan dikalungkan pada setiap petugas parkir di titik tersebut. Pelanggan membayar parkir dengan cara memindai kode tersebut sehingga aplikasi QRIS dapat melakukan penarikan pada akun dompet elektronik pelanggan. Akun QRIS ini akan terhubung ke kas daerah sehingga penerimaan retribusi parkir diharapkan lebih terkendali. Masyarakat yang tidak memiliki akun pembayaran non-tunai tetap dapat melakukan pembayaran parkir secara tunai kepada petugas parkir. Pembayaran tunai yang diterima oleh petugas parkir ini akan ditransfer ke kas daerah oleh petugas parkir dengan memindai akun uang elektronik mereka. Dengan demikian, petugas parkir harus memiliki gawai Android dan akun pembayaran elektronik.

Penerapan pembayaran retribusi parkir secara non-tunai ini menimbulkan kekhawatiran bagi para petugas parkir. Pertama-tama, para petugas parkir yang sudah terbiasa menggantungkan kebutuhan hidupnya dengan pendapatan parkir harian, merasa akan kekurangan pendapatan. Walaupun proporsi pembagian retribusi bagi daerah dan petugas parkir tetap 30-70, porsi petugas sebesar 70 persen baru akan mereka terima secara dwi mingguan. Kedua, kewajiban petugas parkir untuk memiliki gawai Android dan akun pembayaran elektronik juga memberatkan para petugas parkir.

Perencanaan dibutuhkan untuk mempermudah dalam mencapai tujuan apa pun. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui berbagai upaya, berusaha menggalakkan masyarakat untuk melakukan perencanaan keuangan, terutama dalam keluarga (Karim et al., 2019). Dengan memiliki perencanaan, kegiatan yang dilakukan keluarga akan lebih terarah. Misalnya, setiap keluarga memiliki tujuan yang relatif umum seperti perencanaan pendidikan anak, perencanaan biaya kesehatan, perencanaan pensiun, perencanaan liburan dan perencanaan biaya untuk beribadah seperti melakukan ibadah haji. Tanpa adanya perencanaan keuangan, sumber daya yang dimiliki keluarga, misalnya dalam hal ini gaji atau harta

warisan bisa salah alokasi bahkan kehabisan sebelum tujuan tercapai. Dengan adanya perencanaan keuangan, kita dapat mengetahui seberapa banyak harta yang kita miliki, untuk apa saja harta tersebut digunakan, apakah kita perlu mencari sumber penghasilan lain atau bagaimana kita bisa memanfaatkan harta yang berlebih.

Menurut Karim et al. (2019), merencanakan keuangan sebenarnya bukan merupakan hal yang baru, akan tetapi selama ini perencanaan keuangan diidentikkan dengan menabung. Kegiatan menabung dilakukan sebagai upaya penghematan harta yang dimiliki seseorang. Akan tetapi, dengan kondisi tingkat bunga tabungan saat ini, uang yang kita simpan di bank akan tergerus oleh jumlah biaya administrasi bulanan yang dikenakan bank untuk simpanan di rekening bank. Alih-alih uang yang kita harapkan bisa dihemat malah akan berkurang jika kenaikan jumlahnya tidak bisa menutupi besaran biaya administrasi bulanan yang dikenakan bank. Dengan kondisi tersebut, opsi apa yang bisa kita ambil jika kita ingin merencanakan keuangan dengan mengelola uang yang kita miliki?

Perubahan frekwensi dan bentuk pendapatan yang dialami oleh petugas parkir merupakan hal yang menjadi kekhawatiran bagi para petugas parkir. Kebiasaan mereka mengandalkan pendapatan tunai harian membuat mereka menolak penerapan pembayaran retribusi parkir secara non-tunai. Sampai dengan bulan Januari tahun 2021, sebagaimana yang diberitakan dalam situs daring lombokpos (Redaksi 1, 11 Januari 2021), penerapan sistem pembayaran parkir non-tunai ini tidak bertambah secara signifikan dibandingkan dengan saat sistem ini mulai diujicobakan pada bulan Oktober 2020, terutama jika dibandingkan dengan total titik parkir di kota Mataram. Titik parkir yang menjadi uji coba sebanyak tiga lokasi hanya bertambah menjadi sepuluh lokasi sampai dengan bulan Januari 2021. Hal ini dikarenakan penolakan para petugas parkir terhadap perubahan drastis yang memengaruhi pendapatan mereka, termasuk syarat memberatkan seperti kepemilikan gawai Android serta akun pembayaran non-tunai yang berarti para petugas parkir harus menyisihkan biaya tambahan untuk membayar koneksi internet dan menyetorkan saldo pada akun pembayaran non-tunai.

Walaupun kemajuan teknologi telah mengubah cara kita mengatasi tugas sehari-hari, hal ini tidak berlaku bagi semua lapisan masyarakat. Petugas atau juru parkir di kota Mataram sebagian besar berasal dari lapisan ekonomi bawah yang mengandalkan hidupnya dari pendapatan harian yang mereka terima dari retribusi parkir yang mereka pungut. Perubahan yang terjadi akibat penerapan sistem pembayaran retribusi parkir secara non-tunai jelas berdampak terhadap pola penerimaan pendapatan para petugas parkir. Tujuan baik untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari retribusi parkir dipandang sebagai ancaman bagi kepastian pendapatan para petugas parkir.

Metode Kegiatan

Perkembangan teknologi, cepat atau lambat akan memengaruhi semua aspek hidup kita. Perubahan yang mengiringi perkembangan teknologi ini tidak selalu diterima dengan terbuka oleh pihak-pihak yang terdampak oleh perubahan tersebut. Tuntutan akan akuntabilitas dan ketepatan yang tujuannya jelas akan memberikan manfaat yang lebih besar harus didukung. Penerapan pembayaran retribusi parkir non-tunai yang tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dan mengurangi kebocoran dana pada gilirannya diharapkan dapat menambah pendapatan daerah yang akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan warga di daerah tersebut. Oleh sebab itu, keputusan ini harus didukung oleh pihak-pihak yang terkait, terutama para petugas parkir yang merasa kestabilan mata pencahariannya akan terganggu dengan penerapan sistem baru ini.

Dengan diadakannya pelatihan perencanaan keuangan bagi para petugas parkir yang terdaftar di Dinas Perhubungan Kota Mataram, para peserta kegiatan pengabdian masyarakat tersebut akan mendapat pengetahuan mengenai cara-cara yang dapat mereka lakukan untuk menyiasati perubahan pola penerimaan pendapatan mereka. Melalui pemaparan dan diskusi, para peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat memperoleh ide mengenai bagaimana mereka dapat mengelola pendapatan mereka dengan lebih baik sehingga bisa mengajak rekan-rekan mereka yang lain untuk menerima perubahan sistem pembayaran non-tunai yang dicanangkan oleh pemerintah daerah Kota Mataram.

Metode dan pendekatan yang direncanakan untuk digunakan dalam mencapai kompetensi sosialisasi dan pelatihan adalah metode partisipatif. Komponen pembelajaran ini mencakup dua hal yaitu penyampaian materi secara searah (ceramah dan tutorial) sebesar 50% dan sesi praktik sebesar 50%. Akan tetapi, dengan terjadinya pandemi COVID-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, kegiatan pelatihan dialihkan dalam bentuk sosialisasi secara langsung kepada setiap peserta pelatihan di tempat kerja mereka masing-masing serta pemberian buku berisi materi perencanaan keuangan. Dalam sesi tersebut, tim pengabdian menggunakan kesempatan untuk mempelajari alasan penerimaan maupun penolakan para petugas parkir terhadap penerapan pembayaran parkir secara elektronik.

Hasil

Realisasi retribusi parkir Kota Mataram untuk tahun 2020 masih dianggap jauh dari target. Sebagaimana yang diberitakan oleh Lombok Pos pada 11 Januari 2020, dari target Rp12,5 Miliar, hanya Rp2 miliar saja yang terealisasi. Penerapan sistem pembayaran parkir non tunai merupakan

salah satu upaya pemerintah kota Mataram untuk memaksimalkan pendapatan daerah dari retribusi parkir ini. Melalui sistem pembayaran parkir non tunai, pendapatan parkir akan langsung masuk ke kas pemerintah daerah. Petugas atau juru parkir yang dengan sistem pembayaran tunai mendapatkan persentase dari uang parkir yang disetorkannya, akan mendapatkan upah berdasarkan uang retribusi parkir yang masuk ke sistem secara berkala. Selain untuk mempersingkat jalur penerimaan retribusi parkir, sistem pembayaran non tunai ini diharapkan dapat mengurangi potensi kebocoran PAD yang selama ini terjadi.

Hingga saat pengabdian masyarakat ini dilakukan, belum banyak titik parkir yang menerapkan sistem pembayaran non tunai. Hal ini diakibatkan karena beberapa faktor, antara lain kesiapan juru parkir yang harus memiliki perangkat telepon seluler pintar serta kesediaan juru parkir untuk menerapkan sistem pembayaran non tunai tersebut. Hasil pendataan yang dilakukan oleh anggota tim pengabdian menunjukkan bahwa 30% juru parkir yang menjadi peserta pelatihan tidak setuju dengan kebijakan untuk menerapkan sistem pembayaran non tunai. Penolakan mereka disebabkan oleh berbagai alasan, antara lain kurangnya pengetahuan terhadap sistem pembayaran non tunai, ketidakpastian mengenai pembagian pendapatan dan polemik mengenai ketidaksesuaian kebijakan ini dengan peraturan undang-undang.



Gambar 1. Juru parkir Alfamart Cakranegara setelah mendapatkan pelatihan perencanaan keuangan

Peserta pelatihan perencanaan keuangan berjumlah 20 orang juru parkir yang beroperasi di wilayah Cakranegara. Hanya 35% dari peserta pelatihan tempat operasinya belum menerapkan sistem pembayaran parkir non tunai. Tingkat pendidikan peserta pelatihan juga beragam di mana 5% tidak pernah bersekolah, 20% lulusan SD, 25% lulusan SMP sementara

sisanya adalah lulusan SMA dan sederajat. Semua peserta pelatihan berstatus menikah dengan jumlah tanggungan berkisar antara 1 hingga 4 orang. Kondisi ekonomi peserta pelatihan juga didata berdasarkan kepemilikan rumah dan kendaraan di mana hampir semua peserta tinggal di rumah sendiri dan memiliki kendaraan roda dua. Kepemilikan kendaraan yang masih berstatus belum lunas sebanyak 30% dari peserta pelatihan. Usia peserta pelatihan berkisar antara 22 hingga 63 tahun dengan lama jam kerja harian sebanyak 35% yang bekerja kurang dari 8 jam sedangkan sisanya bekerja lebih dari 8 jam.



Gambar 2. Petugas parkir Bank BTN menerima buku panduan perencanaan keuangan

Sejak mewabahnya COVID-19 di pulau Lombok, pemerintah daerah menerapkan pemberlakuan berbagai kegiatan yang mengumpulkan orang di tempat umum serta pembatasan jarak. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian terpaksa disesuaikan dengan kondisi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) agar tidak membahayakan tim pengabdian dan peserta pelatihan. Pelaksanaan pelatihan yang semula direncanakan berbentuk kegiatan tutorial bersama, akhirnya dialihkan menjadi penyuluhan langsung secara individu kepada 20 orang peserta pelatihan yang merupakan juru parkir di titik-titik parkir seputar wilayah kota Mataram, terutama wilayah Cakranegara yang mayoritas merupakan titik parkir yang telah menerapkan sistem pembayaran parkir non tunai.

Diskusi

Dalam sesi pelatihan dan diskusi secara individual dengan petugas parkir, tim pengabdian juga meminta para peserta pengabdian untuk mengisi kuesioner. Selain untuk memperoleh data terkait kondisi ekonomi para peserta pelatihan, kuesioner tersebut juga berisi pertanyaan mengenai penerapan e-parkir atau pembayaran parkir secara elektronik berikut alasan para petugas parkir menyetujui ataupun tidak menyetujui kebijakan tersebut.

Tanggapan peserta pelatihan mengenai penerapan e-parkir, disajikan pada Gambar 4. Kedua gambar tersebut menunjukkan bahwa 65% petugas parkir beroperasi di titik parkir yang menerapkan pembayaran parkir secara elektronik sementara 35% belum menerapkan. Selain itu, 70% peserta pelatihan setuju dengan kebijakan pembayaran parkir secara elektronik sementara 30% peserta tidak setuju. Peserta yang setuju dengan kebijakan pembayaran parkir secara elektronik beranggapan bahwa dengan metode pembayaran ini, mereka mendapatkan manfaat karena bisa menyisihkan uang pendapatan dari retribusi parkir dalam bentuk tabungan dan tidak perlu datang ke kantor Dinas Perhubungan untuk menyetorkan uang pembayaran parkir. Peserta pelatihan yang setuju tersebut berharap periode pembayaran persentase untuk mereka dilakukan secara tepat waktu. Selain itu, mereka juga berharap pemerintah daerah lebih memerhatikan kesejahteraan mereka dengan memberikan tunjangan tambahan seperti tunjangan hari raya.



Gambar 3. Titik parkir yang menggunakan e-parkir



Gambar 4. Pendapat petugas parkir terhadap penerapan e-parkir

Kuesioner yang diberikan kepada peserta pelatihan juga mengungkap bahwa petugas parkir yang tidak setuju dengan kebijakan pembayaran parkir secara elektronik beranggapan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian aturan penerapan kebijakan ini dengan undang-undang mengenai retribusi parkir. Selain itu, mereka merasa kesulitan menjalankan sistem pembayaran karena kendala teknis seperti tidak mahir mengoperasikan alat yang digunakan seperti ponsel pintar dan merasa keberatan karena harus menanggung biaya tambahan seperti internet untuk menjamin kelancaran pemrosesan pembayaran e-parkir. Kenyataan bahwa mereka lebih terbiasa menggunakan dan mengandalkan uang tunai dari hasil pembayaran parkir secara tunai juga menjadi faktor pemberat dalam menyetujui kebijakan penerapan e-parkir ini.

Sebagai tambahan, masih terdapat ketidakjelasan mengenai mekanisme pembayaran, penyetoran dan pengembali persentase penerimaan retribusi parkir bagi petugas parkir. Oleh sebab itu, sebagian petugas parkir menganggap bahwa keseluruhan uang yang disetorkan melalui pembayaran e-parkir sepenuhnya menjadi penerimaan bagi Dinas Perhubungan.



Gambar 5. Koordinator juru parkir wilayah Cakranegara menerima materi pelatihan

Simpulan

Walaupun terkendala pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, kegiatan pengabdian berupa pelatihan perencanaan keuangan bagi petugas parkir di kota Mataram, terutama pada titik parkir seputar kecamatan Mataram dan Cakranegara telah berhasil dilaksanakan. Perubahan metode penyampaian materi dari tutorial berbasis kelompok menjadi tutorial secara individual, tidak mengurangi efektivitas pencapaian tujuan kegiatan pengabdian. Para peserta pelatihan bisa mendapatkan manfaat dari pemberian materi pelatihan, yaitu pemahaman yang lebih mendalam mengenai cara-cara merencanakan keuangan yang disesuaikan dengan pola pendapatan.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan bagi dua puluh petugas parkir yang beroperasi di titik-titik parkir seputar wilayah kecamatan Mataram dan Cakranegara. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mengakibatkan jumlah peserta yang bisa mengikuti kegiatan ini menjadi terbatas. Masih banyak petugas parkir yang akan mendapatkan manfaat dari materi mengenai perencanaan keuangan, terutama karena diketahui dari hasil pengumpulan pendapat melalui kuesioner, para petugas parkir sebagian besar menyadari manfaat dari pengelolaan keuangan dan tabungan yang dimungkinkan dengan penerapan sistem pembayaran parkir secara elektronik.

Pengakuan/ Acknowledgements

Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh tim kami tahun ini merupakan pengalaman yang begitu berkesan karena kami harus menyesuaikan dengan kondisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang memaksa kami untuk menyesuaikan dengan berbagai kondisi agar kegiatan ini tetap bisa terlaksana dengan baik. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini tidak terlepas dari partisipasi, dukungan dan bantuan moral, finansial maupun fisik dari banyak pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan ucapan terima kasih kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Bapak Dr. Muaidy Yasin, MS; Koordinator Petugas Parkir wilayah Cilinaya, Bapak Chaerudin dan terlebih lagi kepada peserta kegiatan.

Daftar Referensi

- Karim, Nina Karina, Siti Atikah dan Indria Puspitasari Lenap. 2019. Pelatihan Perencanaan Keuangan dan Pasar Modal Bagi Staf dan Anggota Dharma Wanita Lingkup Bappeda Kota Mataram. Laporan Pengabdian Masyarakat.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Perencanaan Keuangan Keluarga*.
Nirkomala. 2020. Antaranews.
<https://mataram.antaranews.com/berita/136285/dishub-mataram->

- uji-cobakan-pembayaran-parkir-non-tunai diakses pada 10 Februari 2021
- Redaksi. 2020. Lombokpost. <https://lombokpost.jawapos.com/metropolis/11/01/2021/maksimal-an-retribusi-parkir-dishub-kota-mataram-terapkan-pembayaran-nontunai/> diakses pada 10 Februari 2021
- Redaksi. 2020. Insidelombok. <https://insidelombok.id/berita-utama/dishub-mataram-uji-coba-pembayaran-parkir-non-tunai/> diakses pada 10 Februari 2021
- Redaksi. 2021. Lombok Pos. <https://lombokpost.jawapos.com/metropolis/11/01/2021/maksimal-an-retribusi-parkir-dishub-kota-mataram-terapkan-pembayaran-nontunai/> diakses pada 8 November 2021
- Redaksi. 2021. Suara NTB. <https://www.suarantb.com/realisasi-retribusi-parkir-baru-capai-tujuh-persen/> diakses pada 8 November 2021